



**Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
SAMBUTAN**

**UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA**

Yogyakarta, 1 Juni 2021

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam damai sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Peserta upacara yang kami hormati,

Mungkin masih sering muncul pertanyaan dalam hati, sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah mewarnai perjalanan bangsa ini, sebuah negeri yang mahsyur dikenal sebagai Nusantara, ada pula yang menyebutnya sebagai zamrud khatulistiwa.

Mari kita mundur sejenak, memutar waktu, menilik kembali bagaimana toleransi dan kesetaraan beragama tertoreh di era Majapahit, dimana Candi Sumberawan dibangun untuk mendukung ibadah umat Budha Mahayana di era kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk, yang notabene tumbuh besar di lingkungan agama Hindu. Dengan komunitas Islam, Majapahit juga dikenal memiliki hubungan baik dengan Champa. Mengutip uraian Fokkens, dapat dikatakan bahwa cikal bakal pesantren merupakan tanah perdikan di Glagah Arum yang diberikan penguasa Majapahit kepada Raden Fatah. **Itulah salah satu contoh nyata bagaimana negara menjamin kehidupan beragama dan berke-Tuhanan.**

Dalam prinsip kemanusiaan, bangsa Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Indonesia juga-lah yang memprakarsai dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) bersama beberapa negara di Benua Asia dan Benua Afrika. Ide membuat Konferensi Asia-Afrika datang ketika Ali Sastroamidjojo menerima surat dari Perdana Menteri Sri Lanka John Kotelawala pada awal 1954. KAA pada akhirnya melahirkan “Dasasila Bandung” yang memuat cerminan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia.

Di masa perjuangan, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mengundang Sri Paduka PA VII ke kantornya. Beliau bertanya: “Paman, kemarin Bung Karno telah memproklamkan Kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sikap kita?” Pertanyaan tersebut dijawab tegas oleh Sri PA VIII “Kalau menurut saya, kita bergabung dengan Republik Indonesia!” dan ditimpali dengan tegas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX: “Yes, itu juga pemikiran saya”. Dialog di atas menjadi awal integrasi antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan Republik Indonesia. **Apabila kita cermati, bukankah ijab qabul tersebut merupakan contoh nyata dari nilai Persatuan Indonesia?**

Dalam sejarah demokrasi dan pemilu di Indonesia, pemilihan umum tahun 1951 Yogyakarta cukup penting untuk dikedepankan. Pemilihan umum anggota dewan Yogyakarta 1951 perlu dilihat dari sudut pandang bagaimana ide dan gagasan serta kepentingan antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat dijalankan. Inilah konsep demokrasi inklusif, dimana masyarakat Yogyakarta dilibatkan dalam membangun sistem pemerintahan dan demokrasi di Yogyakarta, di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut Yogyakarta. Faktanya, hasil pemilu 1951 dijadikan sebagai parameter untuk penyelenggaraan pemilihan umum secara nasional pada tahun 1955. **Bukankah ini**

sebuah contoh nyata prinsip kerakyatan, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat?

Peserta upacara sekalian yang kami hormati,

“Demokrasi Pancasila adalah idealisasi dari pola perilaku politik yang konon menjadi ciri masyarakat adat yang ber-bhinneka. Demokrasi Pancasila lahir dan tumbuh dari karakteristik spesifik bangsa Indonesia. Pancasila mengusahakan upaya-upaya harmonisasi, kohesi, dan konsensus diantara anak bangsa sekaligus mengisyaratkan kepada individu untuk memberi jalan dan mengutamakan kepentingan bersama. Peran pemerintah adalah untuk mengekspresikan kesatuan tujuan rakyat Indonesia dalam aspirasi dan pembangunan. Perjuangan dalam demokrasi Pancasila adalah untuk mengkonsolidasikan kemerdekaan melalui pembangunan berkelanjutan”

Pernyataan Weatherbee diatas merupakan sebuah bukti empiris, bahwasanya Pancasila dilahirkan dari kebhinekaan adat dan budaya yang lahir dan tumbuh di Indonesia, mengiringi peradaban Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu. Karakteristik Pancasila sebenarnya telah terejawantah dan berpraktik secara alami sejak era kerajaan-kerajaan berjaya.

Saat ini, untuk “Merajut Kembali Persatuan Indonesia”, secara metaforis di dada setiap manusia Indonesia tersemat simbol Garuda Pancasila dengan kaki mencengkeram kuat sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

Meski memiliki keragaman etnik, agama dan keyakinan, budaya dan tradisi, serta bahasa yang paling kaya sekaligus problematik di dunia, kita tetaplah “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa: Indonesia” dalam bingkai NKRI yang tak boleh diubah, karena sudah menjadi realitas final.

Tetapi, pertanyaannya: Apakah cukup secara simbolis seperti itu? Tentu saja harus diikuti upaya-upaya “Aktualisasi Pancasila”. Bukan sebaliknya melambungkan gagasan dan membawanya ke ruang filosofis-utopi dan nostalgia. Tetapi *ideal-binding* itu diubah menjadi *actual-forces* di dunia nyata dengan merekatkan perbedaan menjadi satu kekuatan, bukan konflik.

Pancasila tidak bisa hanya dijadikan ideologi yang berwajah mitos atau politis. Untuk itu, dibutuhkan kerja ekstra keras dari kalangan pemikir guna menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Praktis. Pancasila perlu dikembangkan sebagai metodologi hidup, atau dalam istilah Koentowidjojo, dijadikan sebagai ideologi praktis.

Dalam konteks ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkannya sebagai pedoman berbangsa dan menjadikannya metode hidup. Dengan kata lain, aktualisasi Pancasila tidak akan bisa membumi, jika tetap hanya dijadikan mitos, tanpa memiliki model praktis dalam memecahkan masalah hidup masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila ideologi praktis, maka

setiap perbedaan dan konflik apa pun dapat diselesaikan secara damai dan bermartabat, karena memiliki landasan nilai-nilai atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat yang benar-benar hidup di masyarakat.

Kita semua tentu sepakat bahwa Indonesia adalah pohon yang berdiri tegak, rimbun dan berbuah lebat, pengandaian Indonesia yang maju dan beradab. Indonesia haruslah mampu memakmurkan, memajukan dan memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat dengan pembangunan yang bukan lagi mitos, tetapi maujud menjadi etos bangsa yang konstruktif, visioner, antisipatif, progresif, kritis dan berkelanjutan. Inilah upaya yang sampai saat ini masih kita tempuh bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peserta upacara sekalian yang kami hormati,

Masih dalam masa pandemi, Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2021 mengambil tema “Pancasila Dalam Tindakan, Bersatu untuk Indonesia Tangguh”. Pancasila dalam Tindakan, berarti mengingatkan dan mengajari kita untuk selalu optimistis menghadapi masa depan. Kita hadapi semua tantangan dan persoalan bersama-sama sebagai pewaris ketangguhan bangsa ini. Bersatu untuk Indonesia Tangguh, menandakan bahwa kita harus tangguh dan bekerja bersama dalam

menghadapi pandemi Covid-19 yang sudah melanda secara global lebih dari setahun ini.

Tangguh juga dapat dipahami sebagai kekuatan dalam menghadapi beragam tantangan selama masa pandemi dengan beredarnya banyak misinformasi, disinformasi dan hoaks. Terutama ditujukan untuk menjaga kesatuan sebagai bangsa. Mari kita manfaatkan ruang digital secara tepat dan bijak. Mari mengisi ruang digital dengan semangat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, dengan hal yang bermanfaat untuk kemajuan dan pemulihan ekonomi nasional.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengingatkan kita untuk membangun semangat bergerak sebagai bangsa, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Mari kita tanamkan jiwa Pancasila dalam diri kita, keluarga kita dan di masyarakat di sekitar kita, karena Kita adalah Pancasila, dan Pancasila adalah Kita. Inilah sejatinya inti dari Peringatan Hari Lahir Pancasila. Jaya, jaya, dan jayalah selalu Pancasila di Indonesia dan di se-antero dunia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya.*

Yogyakarta, 1 Juni 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X